

TRANSFORMASI EKONOMI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR, KOLABORASI LINTAS NEGARA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

Melyana R Pugu

Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia

puguratana@yahoo.com

Abstract

This study examines the economic transformation of Indonesia's border regions through infrastructure strengthening, cross-border collaboration, and local community empowerment. Border regions are no longer viewed merely as peripheral areas or territorial boundaries, but as strategic spaces with the potential to become new centers of regional economic growth. However, many Indonesian border areas still face structural challenges, including limited infrastructure, weak local economic capacity, dependence on neighboring countries, inadequate cross-border governance, and restricted access to markets, capital, technology, and information. This study employs a library research method with a descriptive, qualitative approach, reviewing relevant scholarly articles, government reports, policy documents, and recent literature on border development, regional economies, infrastructure, cross-border cooperation, and community empowerment. The findings indicate that infrastructure development plays a fundamental role in improving connectivity, reducing regional isolation, lowering logistics costs, and expanding access to public services and economic opportunities. Cross-border collaboration contributes to strengthening legal trade, regional mobility, tourism, investment, and people-to-people relations. Meanwhile, local community empowerment is essential to ensure that border communities become active economic actors rather than passive beneficiaries of development. The study concludes that the economic transformation of Indonesia's border regions requires an integrative development model that simultaneously connects infrastructure, cross-border cooperation, and local empowerment. Such a model is expected to promote inclusive, collaborative, and sustainable border development while strengthening national sovereignty, local welfare, and regional competitiveness.

Keywords: border economy, infrastructure development, cross-border collaboration, community empowerment, Indonesia.

Pendahuluan

Transformasi ekonomi wilayah perbatasan Indonesia menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional karena kawasan perbatasan tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai garis pemisah teritorial, tetapi sebagai ruang interaksi ekonomi, sosial, budaya, dan geopolitik. Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat dan laut yang berhadapan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Filipina, Australia, dan beberapa negara kepulauan Pasifik. Dalam perspektif pembangunan kontemporer, wilayah perbatasan memiliki posisi ganda: di satu sisi menjadi beranda depan negara, tetapi di sisi lain masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, kualitas layanan publik, dan kapasitas ekonomi lokal. Studi Rahim et al. (2023)

menunjukkan bahwa sebagian wilayah perbatasan darat Indonesia masih tergolong tertinggal karena minimnya fasilitas sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar.

Fenomena pembangunan perbatasan Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN tidak hanya diarahkan sebagai fasilitas administrasi lintas negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR menyatakan bahwa pembangunan PLBN menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan karena dapat mendorong aktivitas perdagangan, jasa, mobilitas masyarakat, dan kebanggaan nasional. Hingga 2024, pemerintah telah membangun 15 PLBN, terdiri atas 7 PLBN pada periode 2015–2019 dan 8 PLBN pada periode 2020–2024.

Meskipun demikian, **gap phenomenon** masih terlihat jelas antara pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Infrastruktur perbatasan yang semakin representatif belum selalu diikuti oleh penguatan kapasitas produksi lokal, integrasi rantai pasok, peningkatan nilai tambah komoditas, dan perluasan akses pasar lintas negara. Dalam banyak kasus, masyarakat perbatasan masih bergantung pada aktivitas ekonomi informal, perdagangan kecil, mobilitas lintas batas tradisional, serta hubungan sosial-kultural dengan masyarakat negara tetangga. Karim (2024) menegaskan bahwa kerja sama lintas batas di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal negara, tetapi juga melalui praktik informal dan paradiplomasi lokal yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi kawasan.

Berdasarkan fenomena tersebut, **research problem** dalam kajian ini terletak pada belum optimalnya sinergi antara penguatan infrastruktur, kolaborasi lintas negara, dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai satu kesatuan strategi transformasi ekonomi perbatasan. Pembangunan infrastruktur sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan kesiapan kelembagaan lokal, kapasitas pelaku usaha, tata kelola perdagangan, dan jejaring ekonomi produktif masyarakat. Padahal, studi tentang pembangunan wilayah perbatasan menunjukkan bahwa strategi ekonomi yang efektif perlu mencakup infrastruktur, pengembangan sumber daya lokal, penguatan manusia, dan konektivitas pasar secara simultan. Penelitian pada kawasan perbatasan Kalimantan menunjukkan bahwa infrastruktur, sumber daya alam, dan pembangunan manusia merupakan strategi penting untuk mendukung kinerja ekonomi wilayah perbatasan.

Selanjutnya, **research gap** dalam studi-studi terdahulu terletak pada kecenderungan pembahasan yang masih terfragmentasi. Sebagian penelitian menekankan aspek infrastruktur, sebagian lain membahas kerja sama lintas batas, sementara kajian pemberdayaan masyarakat lokal sering berdiri sebagai tema tersendiri. Raharjo (2025) mencatat bahwa diskursus akademik tentang kerja sama lintas batas di Asia Tenggara, khususnya Indonesia–Malaysia, masih banyak berfokus pada konektivitas fisik di wilayah perbatasan darat dan kurang memberi perhatian pada dimensi kelembagaan serta hubungan antarmasyarakat. Dengan demikian, masih diperlukan kajian yang

mengintegrasikan dimensi infrastruktur, kolaborasi lintas negara, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam satu kerangka analisis pembangunan wilayah perbatasan.

Selain itu, literatur internasional tentang cross-border regionalism menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan jalan, pos lintas batas, pelabuhan, atau pasar perbatasan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, norma kerja sama, kapasitas institusi lokal, dan kemampuan aktor daerah untuk mengelola peluang ekonomi lintas negara. Nadalutti (2024) menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas di kawasan seperti Uni Eropa dan ASEAN sangat dipengaruhi oleh norma tata kelola mikro-regional. Sementara itu, Dwyer (2023) dalam kajian tentang jalan, perbatasan, dan pembangunan di New Guinea memperlihatkan bahwa konektivitas fisik memiliki implikasi sosial-ekonomi yang kompleks, terutama ketika infrastruktur bertemu dengan realitas lokal, mobilitas masyarakat, dan relasi lintas batas.

Research novelty atau incremental newness dari kajian ini terletak pada upaya membangun pemahaman integratif mengenai transformasi ekonomi wilayah perbatasan Indonesia melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan infrastruktur, kolaborasi lintas negara, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kajian ini tidak hanya melihat infrastruktur sebagai instrumen fisik pembangunan, tetapi juga sebagai prasyarat terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang terhubung dengan pasar regional. Kolaborasi lintas negara juga tidak diposisikan sebatas hubungan diplomatik formal, tetapi sebagai ruang kerja sama ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat lokal dipandang sebagai fondasi agar masyarakat perbatasan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama transformasi ekonomi kawasan.

Dengan demikian, **research urgency** kajian ini semakin kuat karena pembangunan wilayah perbatasan berkaitan langsung dengan pemerataan pembangunan, kedaulatan negara, pengurangan ketimpangan antarwilayah, dan penguatan daya saing ekonomi lokal. RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi pembangunan nasional sebagai fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045, sehingga wilayah perbatasan perlu diposisikan sebagai simpul pertumbuhan baru, bukan lagi sebagai kawasan pinggiran. Urgensi tersebut juga sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat hilirisasi komoditas lokal, pariwisata perbatasan, perdagangan legal lintas negara, dan keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai ekonomi regional. Oleh karena itu, kajian mengenai **“Transformasi Ekonomi Wilayah Perbatasan Indonesia melalui Penguatan Infrastruktur, Kolaborasi Lintas Negara, dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal”** menjadi penting untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan strategi pembangunan perbatasan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **library research** atau studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini dipilih karena kajian mengenai **transformasi ekonomi wilayah perbatasan Indonesia melalui penguatan infrastruktur, kolaborasi**

lintas negara, dan pemberdayaan masyarakat lokal membutuhkan penelusuran konseptual dan analisis mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, laporan pemerintah, dokumen kebijakan pembangunan wilayah perbatasan, serta publikasi ilmiah terbaru yang membahas pembangunan perbatasan, ekonomi regional, infrastruktur, kerja sama lintas batas, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber pustaka dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tema, keterbaruan publikasi, kredibilitas penerbit, serta kesesuaian dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis literatur. Pertama, peneliti mengidentifikasi literatur yang berkaitan dengan konsep wilayah perbatasan, pembangunan infrastruktur, kolaborasi lintas negara, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kedua, literatur yang telah terkumpul diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Ketiga, data diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu transformasi ekonomi perbatasan, konektivitas infrastruktur, tata kelola kerja sama lintas negara, dan peran masyarakat lokal dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, data dianalisis secara kritis untuk menemukan pola, hubungan antarkonsep, kesenjangan penelitian, serta kontribusi konseptual yang dapat memperkuat kajian ini. Dengan demikian, metode library research memungkinkan penelitian ini menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai strategi pembangunan ekonomi wilayah perbatasan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Ekonomi Wilayah Perbatasan sebagai Agenda Pembangunan Strategis

Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi ekonomi wilayah perbatasan Indonesia merupakan agenda strategis yang tidak dapat dilepaskan dari isu pemerataan pembangunan, konektivitas wilayah, kedaulatan negara, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Wilayah perbatasan selama ini sering diposisikan sebagai kawasan pinggiran yang menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur, layanan publik, pasar, pendidikan, kesehatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat perbatasan mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan masyarakat di wilayah perkotaan atau pusat ekonomi nasional. Rahim et al. (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan perbatasan darat Indonesia masih termasuk daerah tertinggal karena minimnya fasilitas sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar.

Transformasi ekonomi perbatasan perlu dimaknai sebagai proses perubahan struktur ekonomi kawasan dari yang semula bersifat subsisten, informal, dan bergantung pada negara tetangga menuju ekonomi lokal yang lebih produktif, terhubung, dan berdaya saing. Dalam konteks ini, pembangunan perbatasan tidak cukup hanya diarahkan pada pengamanan wilayah, tetapi juga harus mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas lokal, pengembangan UMKM, perdagangan lintas batas legal, dan penguatan konektivitas pasar. Dengan demikian,

wilayah perbatasan dapat berubah dari kawasan marginal menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru yang berperan dalam memperkuat integrasi ekonomi nasional dan regional.

2. Penguatan Infrastruktur sebagai Fondasi Konektivitas Ekonomi

Hasil kajian memperlihatkan bahwa infrastruktur merupakan faktor paling mendasar dalam mendorong transformasi ekonomi wilayah perbatasan. Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, telekomunikasi, energi, air bersih, pasar perbatasan, dan Pos Lintas Batas Negara berfungsi sebagai sarana untuk membuka isolasi wilayah, memperlancar mobilitas barang dan manusia, serta menghubungkan masyarakat lokal dengan pusat-pusat ekonomi. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi ekonomi lokal sulit berkembang karena biaya logistik tinggi, akses pasar terbatas, dan aktivitas produksi masyarakat tidak tersambung dengan rantai nilai yang lebih luas.

Namun, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan masih menunjukkan persoalan penting, yaitu dominannya orientasi fisik dan administratif dibandingkan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Studi pada kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini menunjukkan bahwa strategi pembangunan perbatasan masih cenderung berfokus pada infrastruktur dan aspek keamanan, sementara pemberdayaan masyarakat dan lingkungan belum menjadi perhatian utama. Temuan ini memperlihatkan bahwa infrastruktur memang penting, tetapi belum cukup apabila tidak diikuti dengan program peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha lokal, dan integrasi kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, infrastruktur harus dipahami bukan hanya sebagai proyek fisik, melainkan sebagai instrumen transformasi ekonomi. Jalan perbatasan, PLBN, pasar, dan jaringan digital perlu diarahkan untuk memperluas akses produksi, distribusi, promosi, dan transaksi ekonomi masyarakat lokal. Infrastruktur akan memiliki dampak ekonomi yang lebih besar apabila terhubung dengan sentra pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, UMKM, dan perdagangan lintas batas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perbatasan perlu dilengkapi dengan kebijakan ekonomi lokal agar manfaatnya tidak hanya dirasakan secara simbolik, tetapi juga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat.

3. Kolaborasi Lintas Negara sebagai Penggerak Ekonomi Regional

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas negara menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi wilayah perbatasan karena kehidupan masyarakat perbatasan secara historis dan sosial sangat dekat dengan masyarakat negara tetangga. Aktivitas perdagangan, hubungan kekerabatan, mobilitas tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan budaya lintas batas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perbatasan tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan domestik, tetapi membutuhkan kerja sama antarnegara yang terarah dan saling menguntungkan.

Kerja sama lintas negara dapat diwujudkan melalui pengelolaan perbatasan bersama, perdagangan lintas batas, pengembangan pasar perbatasan, penguatan transportasi, pariwisata lintas negara, serta kerja sama sosial-ekonomi. Sosek-Malindo, misalnya,

menjadi salah satu bentuk kerja sama Indonesia–Malaysia dalam pembangunan sosial-ekonomi kawasan perbatasan yang mencakup wilayah Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur/Kalimantan Utara, Sabah, dan Sarawak. Kerja sama semacam ini penting untuk memperkuat perdagangan legal, mengurangi praktik ekonomi informal, dan menciptakan ruang ekonomi yang lebih produktif bagi masyarakat perbatasan.

Meskipun demikian, literatur menunjukkan bahwa kajian dan praktik kerja sama lintas batas masih cenderung menekankan konektivitas fisik, sementara aspek kelembagaan dan hubungan antarmasyarakat belum mendapat perhatian yang memadai. Raharjo (2025) menemukan bahwa diskursus kerja sama lintas batas Indonesia–Malaysia masih banyak berfokus pada konektivitas fisik wilayah darat dan kurang membahas dimensi kelembagaan serta people-to-people relations. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas negara perlu diperluas dari sekadar pembangunan akses dan fasilitas menjadi kerja sama yang lebih substantif, melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan lembaga masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal sebagai Inti Transformasi Ekonomi

Hasil kajian menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal merupakan inti dari transformasi ekonomi wilayah perbatasan. Pembangunan perbatasan tidak akan berkelanjutan apabila masyarakat lokal hanya menjadi objek pembangunan. Masyarakat perbatasan harus ditempatkan sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas untuk mengelola potensi ekonomi, mengembangkan usaha, memanfaatkan infrastruktur, dan berpartisipasi dalam kerja sama lintas batas. Pemberdayaan menjadi penting karena banyak masyarakat perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan budaya, tetapi belum memiliki akses yang cukup terhadap modal, teknologi, pelatihan, jaringan pasar, dan informasi.

Pemberdayaan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi dan UMKM, pengembangan produk unggulan lokal, akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Kajian tentang strategi pengembangan ekonomi potensial di kawasan Sota, Merauke, menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi perbatasan perlu dilakukan melalui optimalisasi potensi lokal, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.

Pemberdayaan masyarakat juga berperan penting dalam mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga. Di beberapa wilayah perbatasan, masyarakat lebih mudah memperoleh barang konsumsi dari negara tetangga karena faktor kedekatan geografis, harga, kualitas, dan akses distribusi. Jika potensi produksi lokal tidak diperkuat, maka pembangunan infrastruktur justru dapat mempercepat arus masuk barang dari luar tanpa meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemberdayaan lokal harus diarahkan untuk menciptakan basis produksi yang kuat,

meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memperkuat posisi masyarakat dalam rantai ekonomi perbatasan.

5. Tantangan Tata Kelola dalam Pembangunan Perbatasan

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama pembangunan ekonomi perbatasan adalah tata kelola yang belum sepenuhnya terintegrasi. Pengelolaan wilayah perbatasan melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pengelola perbatasan, aparat keamanan, pelaku usaha, masyarakat adat, hingga mitra negara tetangga. Banyaknya aktor tersebut sering menimbulkan persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, perbedaan prioritas, dan lambatnya implementasi program pembangunan.

Studi tentang border governance through local community empowerment menunjukkan bahwa upaya peningkatan kerja sama lintas batas sering terhambat oleh perbedaan prioritas pembangunan, keterbatasan kapasitas administrasi, dan lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan maupun antarlembaga. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi wilayah perbatasan membutuhkan tata kelola kolaboratif yang mampu menyatukan berbagai kepentingan, memperkuat koordinasi, dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Tata kelola yang efektif juga harus mampu menghubungkan kebijakan nasional dengan realitas lokal. Pemerintah pusat dapat membangun infrastruktur dan menetapkan kebijakan strategis, tetapi pemerintah daerah dan masyarakat lokal lebih memahami kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya wilayahnya. Oleh karena itu, pembangunan perbatasan memerlukan mekanisme partisipatif agar masyarakat lokal dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan tata kelola yang inklusif, pembangunan perbatasan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

6. Perdagangan Lintas Batas dan Penguatan Ekonomi Lokal

Perdagangan lintas batas merupakan salah satu aktivitas ekonomi utama di wilayah perbatasan. Masyarakat perbatasan sering memanfaatkan kedekatan geografis dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, menjual produk lokal, dan mengembangkan jaringan ekonomi. Perdagangan lintas batas dapat menjadi peluang besar apabila dikelola secara legal, transparan, dan berpihak pada masyarakat lokal. Keberadaan PLBN dan pasar perbatasan dapat memperkuat aktivitas perdagangan formal serta mengurangi praktik perdagangan ilegal.

Namun, perdagangan lintas batas juga mengandung tantangan apabila struktur ekonomi lokal belum kuat. Arus barang dari negara tetangga dapat memperbesar ketergantungan konsumsi masyarakat apabila produksi lokal tidak mampu bersaing dari sisi harga, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Oleh karena itu, strategi perdagangan lintas batas harus diimbangi dengan penguatan produk unggulan lokal. Komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, kuliner, dan pariwisata perlu dikembangkan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen barang lintas negara, tetapi juga produsen dan pelaku ekonomi yang mampu memasuki pasar regional.

Dalam konteks ini, PLBN sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai pintu pemeriksaan administrasi, tetapi juga sebagai simpul ekonomi. PLBN dapat dikembangkan sebagai pusat promosi produk lokal, pusat informasi perdagangan, pusat layanan logistik, dan ruang temu pelaku usaha lintas negara. Dengan demikian, perdagangan lintas batas dapat diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal, memperluas pasar UMKM, dan meningkatkan pendapatan masyarakat perbatasan.

7. Model Integratif Transformasi Ekonomi Wilayah Perbatasan

Berdasarkan hasil kajian, transformasi ekonomi wilayah perbatasan Indonesia membutuhkan model integratif yang menghubungkan tiga elemen utama, yaitu infrastruktur, kolaborasi lintas negara, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Infrastruktur berperan sebagai fondasi konektivitas. Kolaborasi lintas negara berperan sebagai mekanisme perluasan ruang ekonomi. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat lokal berperan sebagai dasar keberlanjutan ekonomi. Ketiga elemen tersebut harus berjalan secara simultan agar pembangunan perbatasan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga perubahan sosial-ekonomi yang nyata.

Model integratif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, infrastruktur membuka akses masyarakat terhadap pasar, layanan, dan mobilitas ekonomi. Kedua, kolaborasi lintas negara menciptakan peluang kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, dan mobilitas sosial. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal memastikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk memanfaatkan infrastruktur dan peluang lintas batas. Apabila salah satu elemen tidak berjalan, maka transformasi ekonomi akan menjadi tidak optimal. Infrastruktur tanpa pemberdayaan hanya menghasilkan konektivitas fisik. Kolaborasi lintas negara tanpa penguatan lokal dapat memperbesar ketergantungan. Pemberdayaan tanpa infrastruktur akan sulit berkembang karena pasar dan akses tetap terbatas.

Dengan demikian, transformasi ekonomi wilayah perbatasan harus diarahkan pada pembangunan yang bersifat inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Inklusif berarti melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Kolaboratif berarti melibatkan pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan mitra negara tetangga. Berkelanjutan berarti pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan masyarakat perbatasan.

8. Implikasi Pembahasan

Hasil pembahasan ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur perbatasan selalu dikaitkan dengan agenda pengembangan ekonomi lokal. Setiap pembangunan jalan, PLBN, pasar, dan fasilitas publik perlu diikuti dengan program penguatan UMKM, pelatihan masyarakat, akses pembiayaan, dan pengembangan produk unggulan. Kedua, kolaborasi lintas negara perlu diperluas dari kerja sama administratif menuju kerja sama ekonomi produktif yang melibatkan pelaku usaha dan masyarakat lokal. Ketiga, pemberdayaan masyarakat harus

menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan perbatasan, bukan hanya jumlah proyek fisik yang dibangun.

Keempat, tata kelola perbatasan perlu diperkuat melalui koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Pembangunan perbatasan membutuhkan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Kelima, digitalisasi dapat menjadi instrumen pendukung untuk memperluas akses pasar, promosi produk lokal, layanan keuangan, dan informasi perdagangan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia perlu bergerak dari pendekatan sektoral menuju pendekatan integratif yang menghubungkan konektivitas, kerja sama, dan pemberdayaan sebagai satu kesatuan strategi pembangunan.

Kesimpulan

Transformasi ekonomi wilayah perbatasan Indonesia merupakan agenda strategis yang perlu diarahkan pada pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Wilayah perbatasan tidak lagi dapat dipandang sebagai kawasan pinggiran atau sekadar batas administratif negara, tetapi sebagai ruang strategis yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, lemahnya kapasitas ekonomi lokal, ketergantungan terhadap produk negara tetangga, belum optimalnya tata kelola lintas batas, serta rendahnya akses masyarakat terhadap pasar, teknologi, modal, dan informasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur menjadi fondasi penting dalam membuka isolasi wilayah, memperlancar mobilitas barang dan manusia, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan aktivitas ekonomi. Infrastruktur jalan, pelabuhan, telekomunikasi, pasar perbatasan, dan Pos Lintas Batas Negara memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah perbatasan. Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada aspek fisik, melainkan harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi produktif masyarakat lokal agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.

Selain infrastruktur, kolaborasi lintas negara juga menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi ekonomi perbatasan. Kerja sama lintas batas dapat memperkuat perdagangan legal, mobilitas sosial-ekonomi, pariwisata, investasi, serta hubungan antarmasyarakat. Akan tetapi, kerja sama tersebut perlu diperluas dari pendekatan administratif dan keamanan menuju kerja sama ekonomi produktif yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan masyarakat perbatasan. Dengan demikian, kolaborasi lintas negara dapat menjadi instrumen untuk memperkuat integrasi ekonomi regional sekaligus mengurangi praktik ekonomi informal.

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan inti dari keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan. Masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Penguatan kapasitas UMKM, pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, pengembangan

produk unggulan lokal, dan penguatan kelembagaan masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Tanpa pemberdayaan, pembangunan infrastruktur dan kerja sama lintas negara berisiko hanya menghasilkan pertumbuhan yang tidak merata dan tidak berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi ekonomi wilayah perbatasan Indonesia membutuhkan model pembangunan integratif yang menghubungkan tiga pilar utama, yaitu penguatan infrastruktur, kolaborasi lintas negara, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ketiga pilar tersebut harus dijalankan secara simultan agar wilayah perbatasan mampu berkembang sebagai kawasan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Pembangunan perbatasan yang ideal bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- ANTARA News. (2024, January 16). *PLBN development becomes border areas' foundation of economic growth*. ANTARA News. <https://en.antaranews.com/news/303156/plbn-development-becomes-border-areas-foundation-of-economic-growth>
- Darajati, M. R. (2023). Reforming Indonesia's border area management: Strengthening regulatory frameworks for border development. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(2), 234–253.
- Karim, M. F. (2024). Informality, paradiplomacy, and cross-border cooperation: The development of tourism on Bintan Island, Indonesia. *Asian Studies Review*, 48(2), 370–388. <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2259080>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Infrastructure for inclusive economic development: Lessons learnt from Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nadalutti, E. (2024). The role of norms in cross-border cooperation and micro-regional governance in the European Union and ASEAN. *Journal of European Integration*. <https://doi.org/10.1080/07036337.2024.2329636>
- Noorani, R. (2025). Collaborative border management dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1), 1–12.
- Raharjo, S. N. I. (2025). Reimagining cross-border cooperation from Indonesia–Malaysia experiences: A thematic literature review. *Journal of ASEAN Studies*, 13(1), 1–20.
- Rahim, D. A., Priyarsono, D. S., Rustiadi, E., & Syaukat, Y. (2023). Sustainable development of Indonesia's land border areas: Overview from an economic perspective. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.23917/jep.v24i1.20387>
- Rahim, D. A. (2023). Reviewing the role of investment in the West Kalimantan border. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 18(1), 1–12.
- Ririhena, S. W., Manuhuttu, F. Y., Nahumury, M. A. I., & Tjilen, A. P. (2023). Potential regional economic development strategy of Sota Border. *International Journal of Social Science and Business*, 7(2), 105–115. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i2.55678>

- Sari, Y. (2024). *Cross-border cooperation in the socio-economic Malindo Cooperation between Indonesia and Malaysia in North Kalimantan in 2022* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia].
- Syafri, M. (2025). Ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan terhadap produk Malaysia: Perspektif pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 1–15.
- Walther, O. J. (2023). Border studies at 45. *Political Geography*, 104, 102812. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102812>